

SKRIPSI

PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

**INDIRA REZKIYAH ISHAK
A011191026**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :

**INDIRA REZKIYAH ISHAK
A011191026**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

INDIRA REZKIYAH ISHAK
A011191026

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 7 Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. Agus Salim, SE., M.Si.
NIP. 19670817 199103 1 006

Pembimbing Pendamping



Dr. Sabir, SE., MSi., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., MSi., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

INDIRA REZKIYAH ISHAK
A011191026

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 7 Maret 2023 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Tim Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Agussalim, SE., M.Si.	Ketua	
2.	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®	Sekretaris	
3.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Anggota	
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®	Anggota	

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Indira Rezkiyah Ishak
Nomor Pokok : A011191026
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul *Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Maret 2023

Yang Menyatakan



Indira Rezkiyah Ishak

A011191026

PRAKATA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi dengan judul **“PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN”** disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, serta saran dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi pelajaran bagi penulis pribadi maupun para pembaca.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orang tua, untuk Ayah Dr. Ishak, SE, M.Si, Ak. CA dan Ibu Andi Herawati ST yang telah memberikan banyak doa dan didikan serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemuliaan atas semua hal berarti yang telah mereka lakukan. Kepada Kakakku Agam Abdillah Ishak dan

Adik-adikku, Insani Ayudiah Ishak, Inayah Amaliah Ishak, dan Aini Nurunnisa Ishak yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Bapak Dr. Sabir SE., M.Si., CWM® dan Sekretaris Departemen Ibu Dr. Fitriwati, SE.,M.Si. Terima Kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Agussalim, SE, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr.Sabir SE.,M.Si., CWM® selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses bimbingan skripsi, peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan bapak dosen pembimbing. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan bapak dosen pembimbing.
5. Dr. Agussalim, SE, M.Si selaku penasihat akademik peneliti yang memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi kepada peneliti selama menjalankan studi di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

6. Dr. Sultan Suhab, SE, M.Si dan Dr. Sanusi Fattah SE., M.Si., CSF., CWM® selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan motivasi dan saran bagi peneliti untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Sahabat-sahabatku sekaligus teman seperjuangan masa kuliah yaitu: Tariza Desty Ramadhana, Nurul Fitria Ramlan, Wa Ode Fadhilatun Nisa, Doveni Angelita, Putri Auliah Azani, Ratna Sari dan Muh. Kurniawan Saputra. Serta Fatimah Azzahra dan The 2001 yaitu Nuraeni, Audri Putri Arizka, dan Olivia Audrieza. Terima kasih sahabat-sahabatku hingga saat ini telah memberikan segenap bantuan baik itu arahan serta pemikiran yang sangat membantu peneliti serta terima kasih telah menemani saat suka maupun duka. Semoga seterusnya kita terus menjalin pertemanan hingga tua nanti. Aamiin.
9. Teman-teman GRIFFINS dan keluarga besar HIMAJIE. Terima kasih telah menemani saat suka maupun duka dalam berproses sebagai mahasiswa. Semoga cita-cita dan impian kita dapat tercapai. Aamiin.
10. Teman-teman KKN Tematik Gel.108, keluarga BORMASCER yaitu Yansen, Della, Dhila, Lani, Pio, Dinda, Agam dan Iwan. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan penyemangat dalam menjalankan KKN selama kurang lebih dua bulan. Semoga seterusnya kita terus menjalin pertemanan hingga tua nanti. Aamiin.
11. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 7 Maret 2023

Indira Rezkiyah Ishak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan pengeluaran pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap jumlah penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Adapun data yang digunakan yaitu data time series Tahun 2000-2021 di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur yang merupakan model struktural.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan pengeluaran pemerintah daerah tidak berpengaruh secara langsung terhadap jumlah penduduk miskin. Secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, variabel Penanaman Modal Asing tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Sementara itu, variabel Penanaman Modal Dalam Negeri dan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of foreign investment, domestic investment, and local government spending both directly and indirectly on the number of poor people through economic growth in the province of South Sulawesi. This study uses secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics. The data used is time series data for 2000-2021 in South Sulawesi Province. The analytical method used is path analysis which is a structural model.

The results of this study indicate that the variables of Foreign Investment, Domestic Investment, and local government spending do not directly affect the number of poor people. Indirectly through economic growth, the Foreign Investment variable has no effect on the number of poor people. Meanwhile, the variable Domestic Investment and local government spending has a negative and significant effect on the number of poor people through economic growth.

Keywords: *Foreign Investment, Domestic Investment, Regional Government Expenditure, Economic Growth, Number of Poor Population*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Konseptual.....	10
2.1.1 Kemiskinan	10
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.3 Investasi	17
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah	19
2.2 Tinjauan Teoretis.....	22
2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan	22
2.2.2 Hubungan Investasi dengan Kemiskinan	25
2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Kemiskinan	27
2.2.4 Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi	30
2.2.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi	32
2.3 Hasil Penelitian dan Studi Empiris	34
2.4 Kerangka Penelitian	36
2.5 Hipotesis Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	39

3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	39
3.2 Jenis dan Sumber Data	39
3.3 Metode Pengumpulan Data	39
3.4 Metode Analisis Data.....	40
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Perkembangan Umum Variabel Penelitian	45
4.1.1 Perkembangan Angka Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan	45
4.1.2 Perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan	49
4.1.3 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Sulawesi Selatan	52
4.1.4 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Sulawesi Selatan	55
4.1.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	58
4.2 Hasil Estimasi.....	62
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	69
4.3.1 Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Baik Secara Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Jumlah penduduk miskin Melalui Pertumbuhan Ekonomi	69
4.3.2 Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Baik Secara Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Jumlah penduduk miskin Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	71
4.3.3 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Baik Secara Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Jumlah penduduk miskin Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	74
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2021	2
Tabel 4.1 Perkembangan Angka Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021	46
Tabel 4.2 Perkembangan Nilai PDRB ADHK 2010 dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021	50
Tabel 4.3 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021	53
Tabel 4.4 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021	56
Tabel 4.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021.....	59
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Pengaruh PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	62
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Pengaruh PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi	64
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Pengaruh Tidak Langsung Variabel PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Melalui Pertumbuhan Ekonomi	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2021 (Persen)	4
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	37
Gambar 4.1 Bagan Hasil Penelitian.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah persoalan atau masalah perekonomian makro Indonesia yang selalu menjadi sorotan. Pada hakikatnya, ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang terjadi antar kelompok masyarakat serta tingkat kemiskinan yang ditunjukkan melalui jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara sedang berkembang (NSB), termasuk di Indonesia (Purba dkk, 2021). Kemiskinan menjadi salah satu penghambat terwujudnya cita-cita bangsa dalam mencapai kesejahteraan yang mampu dirasakan oleh setiap individu.

Nurske mengatakan bahwa kemiskinan terjadi bukan hanya karena tidak adanya pembangunan di masa lalu, tetapi juga menimbulkan hambatan terhadap pembangunan di masa yang akan datang (Hasan dan Azis, 2018). Oleh karenanya, pengentasan kemiskinan menjadi tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilakukan melalui penetapan berbagai kebijakan yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang akan menaikkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan distribusi pendapatan yang merata serta berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi persoalan terkait kemiskinan. Kemiskinan dalam hal ini digambarkan salah satunya melalui persentase jumlah penduduk miskin

terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan pada suatu daerah atau wilayah. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*) dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk dan Angka Kemiskinan Provinsi
Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	8.512.608	797.700	9,39
2016	8.598.604	807.030	9,40
2017	8.674.372	813.070	9,38
2018	8.748.052	792.640	9,06
2019	8.819.549	767.800	8,69
2020	9.073.509	776.830	8,72
2021	9.139.531	784.980	8,78

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari **Tabel 1.1** dapat dilihat bahwa jumlah maupun persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rentang waktu tujuh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di daerah ini sebesar 797.700 jiwa dari 8.512.608 jiwa jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin ini kemudian mengalami kenaikan di tahun 2016 hingga tahun 2017 menjadi sebesar 813.070 jiwa dari 8.674.372 jumlah penduduk. Di tahun 2018 hingga tahun 2019, angka jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan menjadi 767.800 jiwa dan terus mengalami kenaikan di dua tahun

berikutnya, yaitu tahun 2020 dan 2021 hingga mencapai angka sebesar 784.980 jiwa atau 8,78 persen dari jumlah penduduk total. Besar kecilnya angka penduduk miskin ini sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin. Dengan kata lain, penduduk tersebut memiliki tingkat pendapatan yang tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan minimum yang diperlukan untuk hidup secara layak.

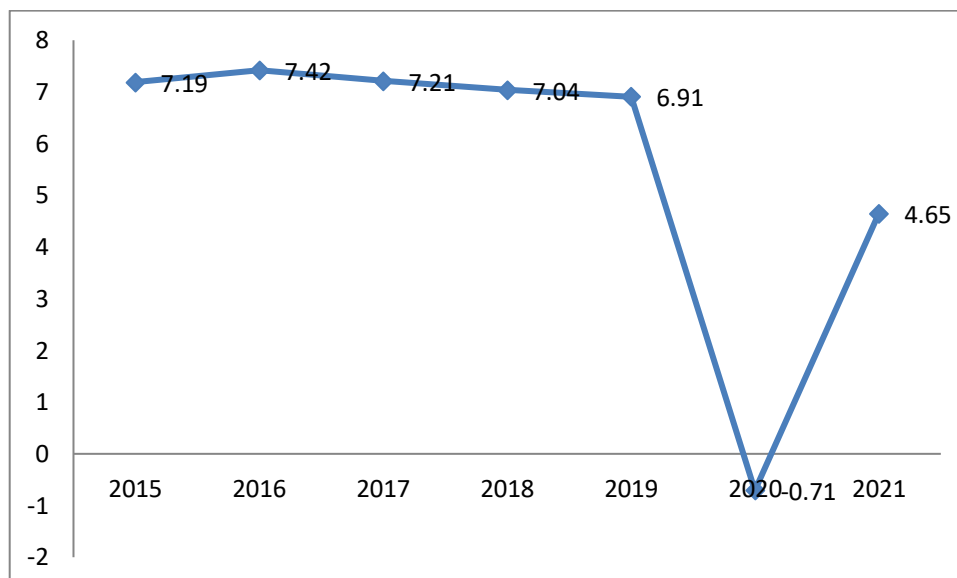
Tingginya angka kemiskinan akan menyebabkan hadirnya masalah sosial lainnya seperti peningkatan kriminalitas, banyaknya anak maupun orang dewasa melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya mereka kerjakan, konflik sosial, keterbatasan dalam mengakses pendidikan, dan lain-lain. Berbagai masalah sosial tersebut dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di daerah yang menghadapi persoalan kemiskinan, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.

Standar hidup di dunia ekonomi tergantung pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan produksi memiliki kontribusi dalam menambah lapangan pekerjaan yang mendorong pengurangan kemiskinan (Mankiw, 2018). Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari nilai PDB ataupun PDRB suatu wilayah. PDB atau PDRB ini menunjukkan total nilai yang merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa atau nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau daerah. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu hal yang mendukung perwujudan pembangunan pada suatu daerah atau wilayah.

Pembangunan pada suatu daerah dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang juga merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan (Agustini dan Kurniasih, 2017).

Meskipun begitu, data yang ada menunjukkan bahwa meningkatnya kapasitas produksi yang tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tidak selalu diikuti dengan penurunan angka kemiskinan pada wilayah tersebut.



Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari angka pertumbuhan ekonomi pada **Gambar 1.1** dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang dihitung dengan menggunakan angka PDRB, mengalami fluktuasi dalam rentang waktu tujuh tahun terakhir. Di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi pada daerah ini adalah

sebesar 7,19 persen. Angka ini selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 7,42 persen pada tahun 2016 dengan nilai PDRB sebesar 269.401,31 miliar rupiah. Kemudian, pada 3 tahun berikutnya yaitu tahun 2017 hingga tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tersebut terus mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 6,91 persen. Meskipun nilai pertumbuhan ekonomi ini cenderung mengalami penurunan, nilai output yang dihasilkan dan ditunjukkan melalui angka PDRB terus mengalami kenaikan yang positif. Di tahun 2020, adanya pandemic Covid-19 yang melumpuhkan banyak sektor telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan yang signifikan hingga menyentuh angka yang negatif yaitu sebesar -0,71 persen. Pertumbuhan ekonomi yang negatif pada tahun ini menunjukkan penurunan angka PDRB dari yang sebelumnya sebesar 330.506,38 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 328.154,57 miliar rupiah di tahun 2020. Selanjutnya, di tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi ini kembali mengalami kenaikan yang cukup baik menjadi 4,65 persen dengan nilai PDRB sebesar 343.402,51 miliar rupiah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tergolong cukup baik, namun hal tersebut masih belum mampu mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Mankiw. Jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami kenaikan tanpa disertai dengan perluasan kesempatan kerja telah menyebabkan angka kemiskinan di wilayah ini tergolong cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagian besar didominasi oleh penduduk di daerah pedesaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh data yang dirilis oleh BPS, dimana persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada provinsi ini mencapai angka 11,55 persen pada semester 2 (september) tahun 2021. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada waktu yang sama adalah sebesar

4,89 persen. Hal ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap golongan dalam masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah, termasuk diantaranya adalah investasi dan pengeluaran pemerintah. Keynes mengatakan bahwa kegiatan perekonomian terutama tergantung kepada segi permintaan, yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Semakin besar perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Perbelanjaan agregat tersebut dibagi menjadi empat komponen yaitu, pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih (Sukirno, 2016).

Kegiatan investasi yang ditunjukkan melalui pembelian barang modal yang baru, tambahan penggunaan tenaga kerja, dan pembelian tambahan atas bahan-bahan mentah akan menaikkan pendapatan nasional. Kenaikan dari pendapatan nasional tersebut, dengan sendirinya akan menambah pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan menimbulkan pertambahan baru dalam konsumsi rumah tangga (Sukirno, 2015). Dengan kata lain, peningkatan investasi yang tercermin dalam kegiatan penanaman modal yang meningkat, tentunya akan berdampak positif terhadap proses produksi dalam bisnis yang semakin giat dan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemiskinan dimana dengan investasi yang menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, maka angka kemiskinan dapat menurun karena adanya efek multiplier dari investasi itu sendiri terhadap roda perekonomian.

Tingginya angka kemiskinan tentu akan menjadi sebuah persoalan yang menghambat perwujudan pembangunan di suatu negara atau daerah. Oleh karenanya, dalam mengentaskan masalah tersebut diperlukan adanya peran pemerintah dalam mengatur jalannya suatu perekonomian. Menurut Prasetyo (2015), ada banyak studi yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal adalah wujud intervensi pemerintah dalam rangka mengatasi kegagalan pasar. Hubungan negatif antara peningkatan anggaran belanja dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dikarenakan pengeluaran pemerintah ini memiliki kapasitas dan kemampuan dalam membentuk pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan. Dampak dari peningkatan pendapatan ini adalah berkurangnya penduduk miskin.

Sukirno (2015) juga mengatakan bahwa salah satu tujuan makroekonomi yang ingin dicapai oleh suatu negara adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam mewujudkan hal ini yaitu melalui kebijakan fiskal dimana pengeluaran pemerintah merupakan bagian dalam kebijakan tersebut.

Pengentasan masalah kemiskinan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang mampu mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran, serta menciptakan strategi-strategi yang efektif dalam

memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan jumlah penduduk miskin yang relatif besar di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah terkait penerapan strategi dan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan masih belum efektif dalam memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Terkait dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Apakah Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran terkait pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat atau merumuskan kebijakan ekonomi dan program-program pembangunan yang tepat dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Selain itu, penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai referensi ataupun rujukan bagi penulis dan peneliti yang melakukan penelitian sejenis maupun pengembangan penelitian ekonomi lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konseptual

2.1.1 Kemiskinan

Ada dua teori utama (grand theory) tentang kemiskinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Cheyne, O'Brien, dan Belgrave dalam Akhmad dan Amir (2020). Kedua teori tersebut adalah teori neo-liberal dan teori sosial demokrat. Terdapat beberapa perbedaan terkait dengan hal-hal seputar kemiskinan berdasarkan kedua teori tersebut.

Dalam teori neo-liberal, kemiskinan dipandang sebagai sebuah persoalan individual yang terjadi akibat kelemahan-kelemahan atau pilihan-pilihan individu tersebut. Kelemahan tersebut dapat berupa kelemahan terkait pengaturan pendapatan maupun kelemahan kepribadian seperti malas, bodoh, dan sebagainya. Para pendukung teori ini setuju bahwa kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan pasar mampu diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Strategi penanggulangan kemiskinan dalam teori ini dapat dilakukan melalui penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif serta memberikan pelatihan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan.

Sementara itu, teori sosial demokrat memandang kemiskinan sebagai persoalan struktural. Penyebab terjadinya kemiskinan dalam teori ini adalah ketimpangan struktur sosial dan politik serta adanya ketidakadilan sosial.

Dengan kata lain, tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu seperti akses pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Menurut teori sosial demokrat, untuk menanggulangi masalah kemiskinan dapat dilakukan dengan penyaluran pendapatan dasar secara universal dan perubahan fundamental dalam pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara.

Kemiskinan merupakan hal yang memiliki banyak definisi dan konsep. Kemiskinan terjadi karena adanya sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang merupakan modal pembangunan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Maipita (2013), kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada di bawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitasnya.

Kemiskinan bersifat multidimensional karena memiliki banyak aspek baik itu aspek primer maupun aspek sekunder. Banyaknya cakupan terhadap aspek tersebut disebabkan karena kebutuhan manusia yang beragam (Pateda dkk, 2017). Hal ini menunjukkan bagaimana kompleksnya masalah kemiskinan karena terdapat banyak aspek di dalamnya, baik itu dari segi miskin akan aset, pengetahuan, informasi, dan sebagainya.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan pada suatu wilayah, maka semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin (Kuncoro, 2015). Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan konsep garis kemiskinan sebagai nilai total dari penjumlahan antara Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Kedua hal tersebut berkaitan dengan pengeluaran untuk kebutuhan sandang, pangan,

dan papan, serta akses terhadap pendidikan maupun kesehatan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi, sedangkan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh BPS berdasarkan pola konsumsi digunakan Bank Dunia untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan dan telaah strategi atau program anti kemiskinan di sebuah negara. Namun, parameter kemiskinan yang digunakan oleh suatu negara tidak bisa digunakan oleh negara lain mengingat adanya perbedaan antara negara-negara tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah garis kemiskinan internasional dalam bentuk nilai tukar PPP US\$1 dan US\$2 sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara (Kuncoro, 2015).

Melbourne Institute mengartikan garis kemiskinan sebagai tingkat pendapatan ataupun pengeluaran yang ditetapkan, dimana apabila pendapatan seseorang berada di bawah tingkatan tersebut, maka ia dikatakan miskin (Maipita, 2013). Dapat dikatakan bahwasanya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki kualitas hidup tergolong rendah. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini. Tujuan penanggulangan masalah kemiskinan ini adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dan ditingkatkan adanya.

Secara umum, ada dua macam ukuran kemiskinan dalam Subandi (2012):

- 1) Kemiskinan absolut yang merupakan konsep kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Dalam konsep kemiskinan ini terdapat garis batas kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup dalam memenuhi kebutuhan fisik untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1997).
- 2) Kemiskinan relatif yang merupakan ukuran kemiskinan yang didasarkan pada keadaan di sekitarnya. Apabila seseorang memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih dianggap miskin.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan diantaranya yaitu, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, bencana alam, adanya sikap malas untuk bekerja, keterbatasan sumber daya alam, modal, dan lapangan kerja, serta adanya beban keluarga yang ditanggung (Pateda dkk, 2017). Adanya faktor-faktor tersebut tentunya akan mendorong angka kemiskinan mengalami kenaikan. Untuk itu, diperlukan berbagai macam strategi dalam mengentaskan masalah terkait kemiskinan itu sendiri. Menurut Pratama dan Utama (2019), faktor-faktor yang menyebabkan turunnya tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintah yang memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Setiap negara tentu memiliki tujuan dalam mencapai tingkat pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Pembangunan suatu negara dapat diwujudkan melalui dukungan pembangunan pada setiap daerah di dalamnya. Salah satu faktor yang mendorong perwujudan pembangunan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno (2016), tingkat pertumbuhan ekonomi mengukur pertambahan pendapatan nasional riil yaitu pendapatan nasional yang dihitung menggunakan harga konstan. Kenaikan pendapatan nasional riil ini mencerminkan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada suatu periode biasanya satu tahun, dibanding tahun sebelumnya. Adapun rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengurangi pendapatan nasional riil tahun yang dihitung dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya dan dibagi dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya, hasil penghitungan tersebut selanjutnya dikali dengan seratus.

Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan penghitungan dari dua hal dalam satu waktu yaitu, pendapatan total yang diperoleh setiap orang pada kegiatan ekonomi dan juga pengeluaran untuk memproduksi output berupa barang dan jasa di dalam perekonomian. Dengan kata lain, PDB dapat melakukan penghitungan pendapatan total dan pengeluaran total dalam satu waktu dikarenakan kedua hal tersebut merupakan hal yang sama (Mankiw, 2018).

Adanya pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya telah mendorong perwujudan pertumbuhan ekonomi, dimana

terjadi peningkatan kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode lainnya (Wahana, 2020). Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan nilai produksi barang dan jasa pada suatu wilayah yang mendorong perubahan kondisi perekonomian menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi ini dihasilkan dari suatu perekonomian yang berhasil meningkatkan modal fisik, modal manusia angkatan kerjanya, dan teknologinya. Pendorong yang paling utama dari sebuah pertumbuhan yang berkelanjutan, kemungkinan adalah kemajuan teknologi. Hal ini dibuktikan oleh peningkatan GDP per kapita di AS yang sebagian besar merupakan hasil dari kemajuan teknologi (Acemoglu et al., 2015). Sementara itu, menurut Putra (2019) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.

Lebih lanjut, adapun pandangan dan analisis terkait faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi dalam Sukirno (2016) beberapa diantaranya adalah Teori Klasik, Teori Schumpeter, Teori Harrod-Domar, dan Teori Neoklasik.

Dalam Teori Klasik, beberapa ahli kaum klasik pada hakikatnya menekankan pada pengaruh perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Adam Smith selaku pelopor utama teori ini mengemukakan beberapa hal yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi

diantaranya yaitu, sistem mekanisme pasar, spesialisasi dan perluasan pasar/kegiatan ekonomi yang selanjutnya akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Sementara itu, Teori Schumpeter yang mengatakan bahwa perkembangan dan kemunduran pertumbuhan ekonomi bergantung pada kegiatan para pengusaha melakukan inovasi. Untuk mewujudkan inovasi tersebut dilakukan melalui kegiatan investasi dimana penambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi.

Adapun Teori Harrod-Domar yang mengatakan bahwa investasi merupakan faktor utama yang ditekankan mengenai perannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang teguh, investasi harus terus menerus mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Kedua ahli ekonomi ini menekankan perekonomian dua sektor dimana perbelanjaan agregat yang menentukan tingkat pendapatan nasional terdiri atas konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan. Selanjutnya adalah Teori Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Profesor Robert Solow. Dalam analisis Neo-Klasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari satu waktu ke waktu lainnya. Teori Neo-klasik bukan hanya memperhatikan peranan tenaga kerja dalam pertumbuhan tetapi juga menganalisis sumbangan dari perkembangan stok modal dan perkembangan teknologi dalam pembangunan ekonomi.

2.1.3 Investasi

Investasi merupakan pembelian barang dan jasa yang akan digunakan di masa depan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Hal ini merupakan penjumlahan dari belanja peralatan, bahan baku (inventaris), dan struktur. Ketika berbicara mengenai investasi yang berkaitan dengan PDB maka investasi disini berarti pembelian barang (peralatan, struktur, dan inventaris) yang digunakan untuk memproduksi barang lain bukan investasi keuangan seperti saham, obligasi, dan sebagainya (Mankiw, 2018). Secara singkat, investasi diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang memiliki tujuan tertentu dan harapan adanya keuntungan dari penanaman modal tersebut. Dengan kata lain, penanaman modal tersebut nilainya mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu.

Investasi pada hakekatnya merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal akan mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi serta mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan yang terbentuk (Wahana, 2020). Investasi sangat berperan besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena adanya multiplier effect yang dihasilkan dari investasi tersebut dimana produktifitas akan meningkat, memacu pertumbuhan, dan memiliki peluang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan (Kolibu dkk, 2017). Hal tersebut menunjukkan bagaimana peran penting investasi dalam perekonomian.

Pembentukan modal dari kegiatan investasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Pembentukan modal tersebut membantu memenuhi keperluan penduduk yang semakin meningkat. Jika

pembentukan modal menyebabkan penggunaan sumber daya alam secara tepat dan adanya pendirian berbagai jenis industri, maka tingkat pendapatan akan bertambah dan berbagai macam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati berbagai macam komoditi, standar hidup meningkat, serta kesejahteraan ekonomi. Proses pembentukan modal melalui investasi ini juga membantu menaikkan output yang pada gilirannya menaikkan laju dan tingkat pendapatan nasional (Purba dkk, 2021).

Penanaman modal terbagi menjadi dua sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing. Sementara itu, Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Investasi yang tercermin dalam kegiatan penanaman modal baik itu berupa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri memiliki peranan tersendiri bagi kelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Putra (2019), penanaman modal asing (PMA) dan investasi portofolio merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut juga berlaku bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang memiliki fungsi dan kedudukan yang penting karena investasi berbentuk penanaman modal ini menjadi aset dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan negara. Penanaman modal ini berperan sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat serta berperan sebagai sarana untuk mengukur pembangunan suatu negara dan juga pendapatan nasional bruto.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Partisipasi dan peran aktif pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada era reformasi saat ini semakin dituntut dan mendapatkan porsi yang semakin besar. Penanganan dan pengelolaan terkait anggaran pendapatan dan pembelanjaan harus efisien dan efektif dalam mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Mangkoesoebroto (2016), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Jumlah pengeluaran pemerintah ditentukan oleh banyak faktor, beberapa diantaranya yaitu jumlah pajak yang akan diterima, tujuan kegiatan

ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan. Sebagian dari pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Berbagai perbelanjaan atau pengeluaran tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2015).

Acemoglu et al. (2015) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan nilai pasar pembelian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Untuk tujuan penghitungan pendapatan nasional, pengeluaran pemerintah tidak memasukkan pembayaran transfer dan pembayaran bunga utang pemerintah. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari perhitungan ganda dimana kedua jenis pengeluaran tersebut merupakan pembayaran yang diberikan kepada agen lain dalam perekonomian yang pada gilirannya akan menggunakan pembayaran tersebut untuk membeli barang dan jasa.

Pengeluaran pemerintah yang menjadi salah satu komponen pembentuk pengeluaran agregat yang mampu memengaruhi peningkatan kegiatan ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Keynes, tentunya harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong perwujudan pembangunan secara nasional. Untuk mewujudkan pembangunan secara nasional ini, diperlukan sinergitas yang baik antar daerah di dalamnya. Disinilah pemerintah daerah berperan melalui instrumen anggaran dalam mengatur jalannya perekonomian di daerahnya masing-masing. Belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah

merupakan salah satu anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah di dalam APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran. Klasifikasi belanja daerah menurut peraturan pemerintah ini yaitu, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Jenis belanja ini terdiri atas; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Menurut Prasetyo (2015), adanya peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik melalui aset tetap yang dimiliki. Tersedianya infrastruktur dari kegiatan belanja modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan di suatu wilayah.

Adapun belanja tidak terduga yang diartikan sebagai pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara itu, belanja

transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Jenis belanja ini terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer ditujukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, mengentaskan masalah kemiskinan, menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah, dan sebagainya.

2.2 Tinjauan Teoretis

Pada bagian ini, dijelaskan tentang teori yang berkaitan dan hubungan antara variabel independen (Investasi dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan) dengan variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan).

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Mankiw (2018) menyatakan bahwa PDB menunjukkan dua hal dalam satu waktu, salah satunya adalah pendapatan total yang diperoleh setiap orang pada kegiatan ekonomi. Dengan demikian, PDB per kapita merupakan total pendapatan rata-rata per orang dalam perekonomian. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui penghitungan PDB merupakan salah satu cara terbaik untuk mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nilai PDB tersebut berhubungan erat dengan standar hidup warga negaranya. Dengan kata lain, tingkat standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan produksi tersebut akan mendorong penambahan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

Dapat dikatakan bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan nilai PDB atau PDRB menunjukkan adanya kenaikan pendapatan per kapita, dimana hal ini memberikan gambaran terjadinya kenaikan nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh tiap penduduk dari aktivitas produksi. Pendapatan per kapita juga menunjukkan gambaran kasar mengenai rata-rata pendapatan setiap penduduk. Terjadinya kenaikan pendapatan per kapita ini selanjutnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini dapat terjadi selama angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk suatu wilayah.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Hasan dan Azis (2018), pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang berarti pula tingkat produksi tinggi akan mengakibatkan perekonomian masyarakat berkembang. Adanya perluasan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari yang tidak bekerja menjadi bekerja. Hal tersebut menjadi bukti bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada agar terjadi penambahan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan harapan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kolibu dkk, 2017). Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai PDB atau PDRB yang dimana jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi meningkat (menambah kapasitas perekonomian) akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang selanjutnya dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam dunia kerja dan mendorong penurunan

angka pengangguran. Sehingga, hal ini akan meningkatkan pula pendapatan perkapita yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan.

Menurut Sukirno (2015), perwujudan pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang akan menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus bertambah dan menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Hal ini terjadi karena dari satu periode ke periode lainnya faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam kuantitas dan kualitasnya. Pertambahan penduduk akan menambah jumlah tenaga kerja, pendidikan dan pengalaman kerja menambah keterampilan dan kemampuan tenaga kerja, penawaran modal menambah barang-barang modal dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih modern, keahlian keusahawanan akan semakin berkembang. Berbagai perkembangan dan perbaikan ini akan menambah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa.

Hubungan antara pertumbuhan dan perubahan angka kemiskinan juga terlihat pada awal 1990-an dan awal abad ke-21. Secara keseluruhan terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan selama beberapa dekade terakhir dan bagian populasi yang hidup dalam kemiskinan. Hal inilah yang mendorong banyak ekonomi percaya bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Meskipun tidak ada kepastian terkait hal ini, proses tersebut dapat terjadi jika saja tidak ada peningkatan ketimpangan ekonomi yang signifikan (Acemoglu et al., 2015). Hasil temuan yang mendukung (Ningsih, 2019; Jayadi dan Bata, 2016; Alisha dan Yulhendri, 2021) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Meski begitu, Tambunan (2001) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terbentuk, bisa saja diikuti dengan peningkatan angka kemiskinan. Ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut. Sejalan dengan hal itu, Khamilah (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bisa saja tidak menyentuh kelompok miskin. Hal itu dikarenakan terjadinya peningkatan pendapatan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dapat dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat saja khususnya kelompok kaya. Dengan kata lain, kualitas pertumbuhan ekonomi yang terbentuk relatif kurang baik yang diikuti dengan ketimpangan yang meningkat. Pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang berhubungan positif ini telah dibuktikan secara empiris (Nadhifah, 2018; Mindayanti dkk, 2021; Ishak dkk, 2020) dimana adanya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan.

2.2.2 Hubungan Investasi dengan Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2006), kemiskinan disebabkan oleh tiga hal, kemiskinan timbul secara mikro karena ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal lainnya yaitu, adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang mendorong rendahnya produktivitas. Penyebab berikutnya adalah perbedaan akses terhadap modal dimana kurangnya akses modal akan menurunkan produktivitas yang mendorong penurunan tingkat pendapatan sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan akan sulit dilakukan. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

Rendahnya investasi ini selanjutnya berakibat pada keterbelakangan atau kemiskinan.

Adanya investasi akan mendorong perluasan lapangan kerja yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menciptakan peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang selanjutnya mampu menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Purba dkk (2021), kegiatan investasi seperti penanaman modal dalam negeri atau asing yang berlangsung di suatu daerah akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dimana investasi tersebut memungkinkan masyarakat terserap dalam dunia kerja dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, masyarakat yang sebelumnya tergolong sebagai pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan adanya investasi tersebut. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Investasi yang meningkat dan ditunjukkan melalui pengembangan usaha-usaha, tentunya akan memerlukan tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan produksinya. Menurut Agustini dan Kurniasih (2017), apabila jumlah lapangan kerja semakin banyak yang diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja yang terserap, maka akan berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja yang terserap tersebut memperoleh pendapatan melalui kegiatan produksi yang mereka lakukan.

Kegiatan penanaman modal yang tercermin dalam pendirian usaha pada suatu wilayah dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

pembangunan pada wilayah yang bersangkutan. Pembangunan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan tersebut bertujuan dalam menurunkan angka kemiskinan. Adanya penanaman modal ini menjadi sumber untuk menaikkan tenaga produksi yang tentunya membutuhkan keahlian penduduk. Dengan kata lain terjadi perluasan lapangan kerja yang pada akhirnya menambah pendapatan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat (Suharlina, 2020). Hal ini didukung dengan hasil empiris (Prasetyawan dkk, 2017; Pateda dkk, 2017; Ratih dkk, 2018) yaitu adanya peningkatan investasi akan menurunkan angka kemiskinan.

Sementara itu, Mustamin, dkk (2015) mengatakan bahwa adanya temuan yang tidak berpengaruh antara investasi terhadap kemiskinan disebabkan karena kebanyakan investasi di suatu wilayah hanya dilakukan oleh kaum menengah ke atas yang dimana hal tersebut hanya memberikan dampak pada kehidupan mereka masing-masing tanpa memberikan pengaruh kepada kehidupan penduduk miskin. Selain itu, tidak adanya pengaruh investasi terhadap kemiskinan ini juga disebabkan oleh pembentukan investasi yang lebih terfokus pada pembangunan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja. Hasil temuan yang mendukung (Suharlina, 2020; Safitri dan Effendi, 2019) bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari investasi terhadap kemiskinan.

2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Kemiskinan

Seperti yang diketahui, pemerintah memiliki fungsi dan tujuan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan masalah kemiskinan. Menurut Iskandar dan Subekan (2016), peran pemerintah dalam pengentasan

kemiskinan sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan peranan pemerintah yang meliputi peranan alokasi, distribusi, dan stabilisasi dimana peranan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan melalui belanja atau dapat juga disebut sebagai pengeluaran pemerintah menjadi stimulus untuk menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lainnya.

Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah yang juga merupakan bentuk intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, digunakan untuk berbagai kepentingan publik khususnya rakyat miskin sehingga adanya kebijakan anggaran tersebut dapat memenuhi tujuannya secara tepat sasaran dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan (Khamilah, 2018). Dengan kata lain, kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan terhadap kebijakan fiskal melalui instrumen pengeluaran atau belanja dapat mengurangi kemiskinan dengan adanya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan kebutuhan publik atau pelayanan umum.

Rostow dan Musgrave yang mengembangkan model tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dan dampaknya terhadap pembangunan. Kedua tokoh ini menyatakan bahwa tahap-tahap pembangunan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan pengeluaran pemerintah yang memadai. Tahapan pembangunan tersebut dapat menciptakan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang menurunkan kemiskinan dengan adanya pengeluaran pemerintah yang teralokasi dengan

baik. Peran pemerintah dalam tahap pembangunan ini misalnya berupa penyediaan prasarana atau pelayanan publik serta pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program pelayanan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hari tua (Mangkoesoebroto, 2016).

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah khususnya pemerintah daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga memungkinkan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan (Pratama dan Utama, 2019).

Beberapa kelompok belanja daerah yang dinilai dapat terhubung langsung dengan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan adalah belanja modal dan belanja transfer. Acemoglu et al., (2015) menyatakan bahwa sebagian besar ekonom menyarankan adanya pembayaran atau pengeluaran transfer pemerintah federal yang memungkinkan pemerintah negara bagian dan lokal untuk mengurangi PHK terhadap beberapa profesi selama masa resesi. Tanpa adanya transfer pemerintah federal, maka negara bagian akan merumahkan banyak pegawai negeri, mengurangi pelayanan publik, dan sebagainya. Ini mencerminkan dampak dari adanya pengeluaran transfer pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Qomariyah dkk (2016) juga mengatakan adanya kebijakan transfer fiskal ke daerah yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberi dampak terhadap kemiskinan. Adanya belanja transfer ini ditujukan untuk meningkatkan

penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah guna menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar sektor. Sementara itu, adanya belanja modal akan mendorong tersedianya berbagai infrastruktur yang selanjutnya akan memudahkan berbagai proses kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan kualitas dan taraf kemakmuran masyarakat sehingga mampu mengentaskan masalah kemiskinan. Hubungan negatif atau tak searah ini sejalan dengan temuan (Irharni, 2018; Waruwu, 2016; Ginting dan Hasibuan, 2019) dimana kenaikan pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan menurunkan angka kemiskinan.

Menurut Putri, dkk (2021), pengeluaran pemerintah daerah dapat tidak memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Ini sejalan dengan hasil empiris (Lantu dkk, 2019; Putro dkk, 2017) dimana hal tersebut terjadi apabila porsi belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah dinilai kurang untuk membiayai berbagai kegiatan produktif dan untuk penambahan lapangan pekerjaan maupun pendapatan baru untuk masyarakat.

2.2.4 Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Secara teoritis, tingkat investasi dikatakan memiliki korelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi yang tinggi akan mendorong peningkatan kapasitas produksi yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat (Agustini dan Kurniasih, 2017). Sejalan dengan teori tersebut, Suharlina (2020) mengatakan bahwa investasi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, setiap negara akan selalu berupaya dalam menciptakan iklim yang dapat menarik hadirnya investasi. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri

dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Dengan tingginya investasi yang ditanamkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Dua ahli ekonomi yaitu Evsey Domar dan Sir Roy. F Harrod juga mengembangkan teori terkait peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini, kedua ahli tersebut memberikan peranan kunci kepada investasi dalam pertumbuhan ekonomi dimana investasi berpengaruh terhadap permintaan agregat melalui penciptaan pendapatan dan terhadap penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Untuk mempertahankan perkembangan ekonomi dalam jangka panjang, maka investasi harus senantiasa ditingkatkan agar pertumbuhan pendapatan dapat cukup menjamin penggunaan kapasitas produksi secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh (Subandi, 2012). Teori ini didukung dengan hasil temuan (Menajang, 2019; Purba, 2020; Pangiuk, 2017), dimana adanya kenaikan investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dapat dikatakan bahwa investasi atau modal adalah penghasil faktor produksi. Jika kegiatan ekonomi produksi saat ini menghasilkan barang modal dalam jumlah yang banyak, maka di masa yang akan datang terdapat banyak persediaan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan banyak jenis barang dan jasa yang lainnya. Mendorong peningkatan nilai tabungan dan investasi menjadi salah satu cara pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan standar hidup ekonomi (Mankiw, 2018). Penambahan faktor produksi dari adanya investasi tersebut akan menyebabkan kenaikan penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Erjergit, dkk (2021) menemukan bahwa investasi yang berupa investasi swasta tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas maupun produktivitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah, sehingga rencana alih teknologi belum dapat terlaksana dengan baik serta adanya pengaruh politik nasional yang tidak stabil. Temuan empiris (Hellen dkk, 2017; Rohmah dkk, 2017; Lebang dkk, 2019) mendukung adanya hubungan yang tidak berpengaruh dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Peran otonomi daerah yang tercermin dalam pengeluaran pemerintah yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Hal tersebut dikarenakan melalui otonomi daerah ini, pemerintah daerah dapat memperdayakan potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah bebas untuk membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan menunjang kemajuan daerah (Pratama dan Utama, 2019). Kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya akan mendorong peningkatan output dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Wibisono (2003) dalam Pateda dkk (2017), pengeluaran pemerintah pada umumnya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang produktif maka semakin besar tingkat perekonomian yang dicapai suatu daerah. Hal ini menggambarkan bagaimana pertumbuhan suatu ekonomi regional maupun

nasional tidak lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik.

Keynes yang merupakan salah satu ahli ekonomi juga mengemukakan teori multiplier terkait pengaruh anggaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada teori tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dapat memperbesar anggaran pengeluaran dalam keadaan perekonomian mengalami resesi, sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan pada akhirnya pendapatan riil masyarakat juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh pada besarnya pendapatan nasional yang menimbulkan perubahan pada golongan pengeluaran tertentu dan pada akhirnya pendapatan nasional akan bertambah beberapa kali lipat dimana proses ini disebut dengan proses multiplier (Dewi dan Vijaya, 2018). Hasil temuan (Pangiuk, 2017; Maisaroh dan Risyanto, 2018; Mauliansyah dan Mard, 2017) mendukung teori yang dikemukakan oleh Keynes.

Menurut Putri, dkk (2021), pengeluaran pemerintah daerah atau belanja daerah yang merupakan bagian dari APBD tidak mampu mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah apabila belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur dan belanja modal masih seringkali di bawah target. Di samping itu, masih banyak daerah yang mengalokasikan porsi belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi belanja barang untuk pemeliharaan infrastruktur dan belanja modal untuk pelayanan publik. Ini sejalan dengan temuan empiris (Lebang dkk, 2019; Koyongian dkk, 2019) dimana pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3 Hasil Penelitian dan Studi Empiris

Pateda dkk (2017) melakukan penelitian dan menganalisis pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo. Data yang digunakan adalah data sekunder dimana menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, investasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo, sementara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kolibu dkk (2017) yang meneliti pengaruh tingkat inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder time series sejak tahun 2006 – 2015. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis statistic inferensia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan adalah bersifat positif, yang berarti jika investasi meningkat maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Hal ini mengandung arti bahwa investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Sulawesi Utara tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian terkait kemiskinan juga dilakukan oleh Prasetyo (2015), ia meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dari belanja konsumsi dan belanja investasi serta realisasi investasi sektor swasta terhadap kemiskinan di 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Metode analisis yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja barang, belanja hibah, belanja peralatan mesin, belanja bangunan gedung, belanja aset tetap lainnya, memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan, namun belanja bantuan sosial, belanja jalan, irigasi dan jaringan, realisasi investasi sektor swasta memiliki pengaruh positif.

Pratama dan Utama (2019) juga melakukan penelitian terkait pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui hubungan beberapa variabel yaitu pengaruh langsung variabel pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap tingkat kemiskinan, pengaruh langsung pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengaruh tidak langsung dari pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali selama periode 2011-2017. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen yang terdapat di BPS. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi memiliki pengaruh langsung positif namun tidak signifikan terhadap tingkat

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

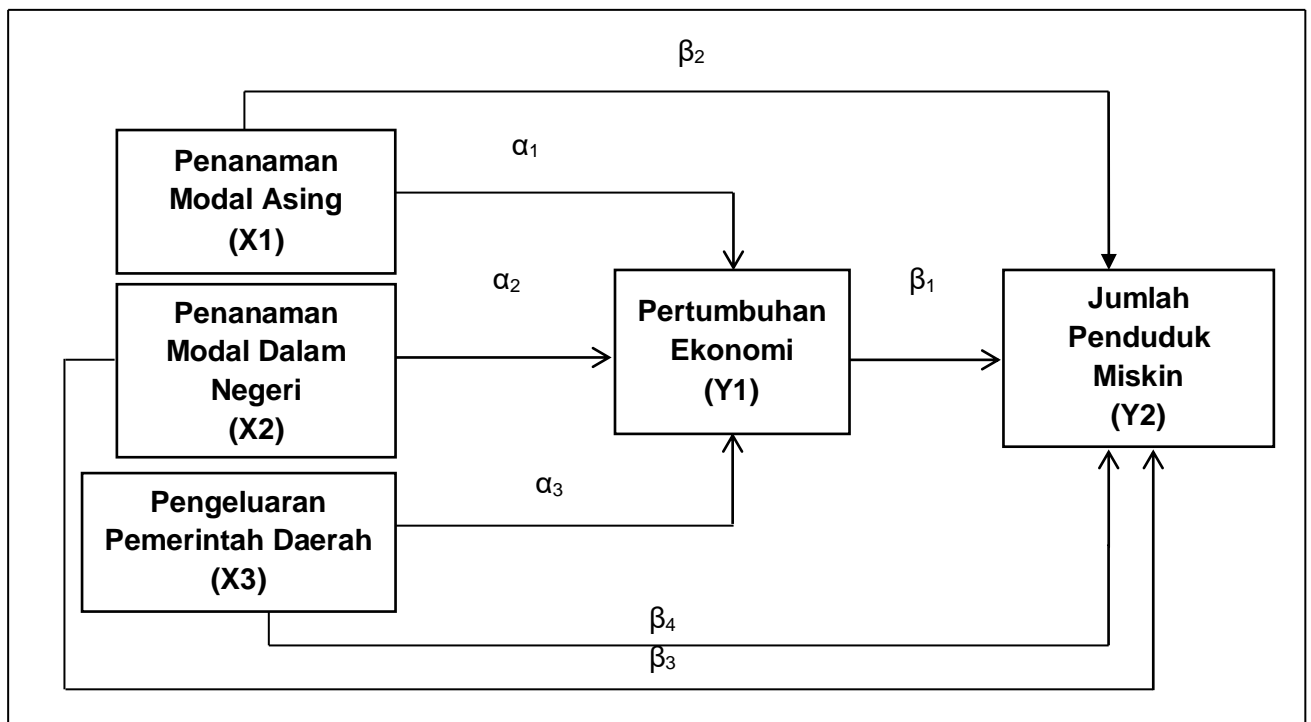
Adapun Wulandari dkk (2021) yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh investasi dan tenaga kerja secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa time series 2002-2018. Metode analisis yang digunakan adalah Two Stage Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh investasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sementara tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini akan melihat pengaruh Penanaman Modal Asing (X1), Penanaman Modal Dalam Negeri (X2) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (X3) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kemiskinan (Y2) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Provinsi Sulawesi Selatan.

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat ditujukan secara langsung untuk mengatasi masalah kemiskinan. Investasi juga dapat diarahkan secara tidak langsung untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengundang investasi yang sebesar-besarnya yang mampu menambah kapasitas perekonomian dan menaikkan jumlah output yang dihasilkan. Peningkatan output yang menjadi salah satu wujud pertumbuhan ekonomi ini akan mendorong terciptanya

lapangan kerja yang luas, sehingga membuka peluang yang besar untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga menjadi hal penting yang dapat mengatasi masalah kemiskinan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat ditujukan secara langsung untuk menciptakan program-program yang menanggulangi masalah kemiskinan misalnya pemberian bantuan dana kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sementara itu, pengeluaran pemerintah juga dapat secara tidak langsung mengatasi masalah kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang berupa belanja pembangunan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sehingga, melalui peningkatan kinerja perekonomian ini diharapkan kesempatan kerja semakin luas dan angka kemiskinan bisa diturunkan adanya. Keterkaitan antara variabel ini, dapat dilihat melalui kerangka konseptual penelitian pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang belum terbukti adanya, sehingga masih perlu diuji kebenarannya. Jadi, hipotesis berisi kemungkinan-kemungkinan jawaban yang timbul dari setiap pertanyaan dalam sebuah penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan.